

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KOTA PALOPO**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat sarjana (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

Abdi Kasri
E 121 05 017

NO. DAFTAR	18 - 6 - 09
NAMA	Abdi Kasri
FAKULTAS	Ilmu Politik
PROGRAM STUDI	Ilmu Politik
NO. URUT	10666
SKRIPSI	SKR - 009
NAMA	KAS
ALAMAT	A

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

Lembar Pengesahan

Skripsi

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KOTA PALOPO**

Yang dipersiapkan dan disusun
oleh :

ABDI KASRI
E 121 05 017

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2009
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui :

Pembimbing I,

Prof. DR. Juanda Nawawi, M.Si
NIP 131 414 620

Pembimbing II,

H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si
NIP 132 288 579

Mengetahui



Ketua Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP : 131 961 985

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Drs. H.A. Syamsu Alam M.Si
NIP : 131 864 112

Lembar Penerimaan

Skripsi
**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI KOTA PALOPO**

Yang dipersiapkan dan disusun
oleh :

ABDI KASRI
E 121 05 017

Teleh diperbaiki
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009

Menyetujui :

PANITIA UJIAN :

Ketua : Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M. Si

Sekretaris : H. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si

Anggota : Dr. Muh. Tamar, M. Psi

Anggota : Dra. Hj. Nurlinah, M. Si

Anggota : Dra. Hj. Rabina Yunus, M. Si

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M. Si

Pembimbing II : H. Suhardiman Syamsu, S. Sos, M. Si



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan inayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Kota Palopo*" sesuai dengan waktu yang telah penulis rencanakan. Dalam format sederhana, penulis menyusun skripsi ini sebagai karya Tulis yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam Penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggungjawab selaku mahasiswa maka penulis dapat menyelesaikannya. Ini juga tidak lepas karena bantuan dari berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik berupa material maupun moril. Olehnya itu, dalam kesempatan ini izinkanlah Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang Tuaku Ayahanda Muh. Kasim dan Ibunda tersayang Mariani. Sudah Terlalu banyak budimu untuk ku, terlalu dalam kasihmu pada ku, namun sudah tak terhitung tetes keringat dan air mata yang telah mengalir demi melihat anakmu berdiri di atas kursi emas impiannya tanpa pernah kau mengharap imbalan sedikit pun. Terima kasih Ayah,

terima kasih ibu! Ini takkan pernah cukup, keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah SWT selalu menyapamu dengan rahmat-Nya.

2. Terimakasih Buat saudaraku tersayang, Kasma, Didi Kasmadi, Uci, Salsa dan Muh. Kaswandi yang selalu memberikan motivasi dan doanya sehingga penulis mempunyai spirit dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Utamanya adalah dorongan moril yang ada dalam diri penulis yang timbul dari rasa ingin memberikan contoh dan teladan yang baik bagi adik-adik. Terlebih lagi penulis adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang pada dasarnya memiliki tanggung jawab besar bagi adik-adik, terutama bagi orang tua.
3. Sari, Irma dan Risma, yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi dalam mempercepat penyelesaian penelitian, sampai proses penulisan skripsi,
4. Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Suhardiman Syamsu, S. sos M.Si. selaku pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya secara teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak Drs. H. A. Syamsu Alam, M.Si. selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan
8. Semua dosen FISIP Unhas Khususnya, Dosen jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintaha yang telah membimbing, mendidik, memberikan pengetahuan serta nasehat-nasehat.

9. Ibu Dra. Hj. Rabina Yunus yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penulisan skripsi ini
10. Pemerintah Kota Palopo, yang telah memberikan sumbangsih berupa dana dan data dalam kelancaran penyusunan skripsi ini
11. Seluruh warga HIMAPEM, khususnya rekan-rekan Revolusioner 05 yang senantiasa memberikan inspirasi dan motifasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman saya Spice Girls, Junaidi, Lalu, Novi Basmin, Wahda, Dilah, Iwan, ifah dan Antonius yang selalu memberikan doa dan support kepada saya
13. Keluarga Besar UKMR, Perbakin dan Kopma Unhas yang selalu mendukung saya
14. Teman-teman Opal Ranting dan Reanimation yangmg setia membantu saya
15. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang tanpa mereka skripsi ini tidak akan terwujud.

Demikianlah kata pengantar ini penulis paparkan. Seluruhnya penulis serahkan kepada Allah SWT. Untaian doa keselamatan dan kesejahteraan atas mereka yang telah memberikan bantuan kepada saya. Karena penulis hanyalah insan lemah yang penuh keterbatasan yang hanya mampu mengucapkan "TERIMA KASIH".

Makassar, 31 Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Lembar Penerimaan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Is	vi
Daftar Tabel	viii
Intisari	ix
Abstract	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Mamfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Kebijakan dan Kebijaksanaan	23
B. Analisis Kebijaksanaan	26
C. Konsep Implementasi	33
D. Konsep Bantuan Langsung Tunai	45
E. Konsep Kemiskinan	48
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	55
A. Sejarah Kota Palopo	55
B. Keadaan Geografi	59
C. Pemerintahan	61
D. Penduduk dan Ketenagakerjaan	62
E. Sosial	65

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Karakteristik Responden.....	67
B. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo.....	70
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Lansung Tunai di Kota Palopo	87
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	 96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
 Daftar Pustaka.....	 98
Lampiran	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kota Palopo	60
Tabel 3.2. Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin Dan Seks Rasio Di Kota Palopo.....	63
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Miskin Dirinci Kecamatan Dan Kelurahan Sekota Palopo Keadaan Tahun 2009.....	66
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Dari Segi Umur.....	67
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Dari Segi Jenjang Pendidikan	68
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Dari Segi Pekerjaan	69
Tabel 4.4 Pendapat Masyarakat Terhadap Pendataan Warga Miskin Yang Dilakukan Oleh BPS	76
Tabel 4.5 Pendapat Masyarakat Terhadap Pengolahan Data Yang Dilakukan Oleh BPS.....	79
Tabel 4.6 Pendapat Masyarakat Terhadap Kemudahan Dalam Penerimaan Dana BLT.....	83
Tabel 4.7 Pendapat Masyarakat Terhadap Pelayanan Dalam Penerimaan Dana BLT.....	84
Tabel 4.8 Pendapat Masyarakat Terhadap Kecepatan Dalam Penerimaan Dana BLT.....	84
Tabel 4.9 Pendapat Masyarakat Terhadap Ketepatan Dalam Penerimaan Dana BLT.....	85
Tabel 4.10 Pendapat Masyarakat Terhadap Kegunaan Dana BLT	86
Tabel 4.11 Pendapat Masyarakat Terhadap Pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo.....	87
Tabel 4.12 Pendapat masyarakat terhadap Kesesuaian Informasi Dalam Pendataan	93
Tabel 4.13 Pendapat Masyarakat Terhadap Keteraturan Pada Saat Pembagian Dana BLT	94

INTISARI

ABDI KASRI, E 121 05 017, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo**". Dibawa bimbingan Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M. Si sebagai pembimbing satu . dan H. Suhardiman Syamsu, S. Sos, M.Si sebagai pembimbing dua.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Dimana penulis berusaha memberikan gambaran secara tepat mengenai pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dan faktor mempengaruhinya Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survei, wawancara, daftar pertanyaan. Selanjutnya, untuk penarikan sampel digunakan teknik *Local Area Sampling*.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai di Kota Palopo belum sepenuhnya merata dalam pendataan sehingga masih ada masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan tersebut, namun dalam segi pencairan dana BLT lancar karena hanya menggunakan waktu relatif cepat.

ABSTRACT

ABDI KASRI, E 121 05 017, Program of Public Administration Science Study, Majors of Politics and Public Administration Science, Faculty of Social Science And Politics, University Hasanuddin, compiling skripsi with the title: "Analyse The Direct Aid Policy Implementation of Cash in Town Palopo". Brought by tuition of Prof. Dr. H. Juanda Nawawi M. The as counsellor one . and H. Suhardiman Syamsu S. Sos, M.Si as counsellor two

This article aim to to know how Direct Aid policy execution of Cash in town Palopo.

Research type used in this research is research type qualitative. Where writer try to give the picture hitly is direct aid policy execution of cash and factor influence it Technique of data collecting used by is with the survey, interview the, questionnaire. Hereinafter, for the withdrawal of sampel used by technique of Local of Sampling Area

Result of research depict that direct aid policy execution of cash in Town Palopo not yet full flatten in data so that society there be still be impecunious do not get the the aid, but in facet of fluent fund BLT liquefaction because only use the time relative quickly

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan mungkin merupakan kata yang sangat ditakutkan bagi berbagai negara di dunia. Kemiskinan, ternyata bukan sekedar sebuah kata benda atau kata sifat. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan kehidupan manusia. Sebagai sebuah persoalan kehidupan manusia, maka kemiskinan telah hadir juga dalam berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari upaya memberi jawab kepada persoalan kemiskinan. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat maupun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan kemiskinan ini.

Di Indonesia, upaya kepedulian terhadap persoalan kemiskinan, bahkan sudah berlangsung sejak lama, baik pada jaman pemerintahan masa Orde Lama, masa Orde Baru, maupun pada masa pemerintahan di era Reformasi ini. Untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan kemiskinan ini, pemerintahan (Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla)SBY-JK juga tidak mau ketinggalan karena SBY-JK

menempatkan isu kemiskinan sebagai fokus kerja pemerintahannya. Bukti nyata dari kepedulian pemerintahan SBY-JK adalah terlihat pada program "Bantuan Langsung Tunai" yang selanjutnya ditulis BLT. Hal mana mulai terlaksana melalui 'Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005', tentang "Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga-rumah tangga miskin di Indonesia". Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program ini adalah dapat menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia, sebagai akibat dari segenap perubahan yang telah terjadi, baik secara nasional maupun global. Kebijakan seperti ini patut diberi *apresiasi*, sebab hal ini juga dapat menjadi salah satu bentuk dari upaya menangani masalah kemiskinan di Indonesia.

Sebagai suatu program dan kebijakan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistimatis, baik secara deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan. Dari sudut deskriptif analisis kondisional dapat dikatakan bahwa program BLT adalah wujud dari hasil sebuah pergumulan *klasik* di seluruh pemerintahan negara-negara seperti Indonesia.

Kemiskinan adalah suatu masalah yang sangat penting dan genting untuk diperhatikan dan ditangani secara serius. Menurut data penelitian lembaga SMERU (suatu lembaga penelitian independen

terhadap kebijakan-kebijakan publik di Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta, jumlah orang miskin di Indonesia sampai dengan tahun 2005 adalah 22% dari total penduduk Indonesia, berarti ada 45 juta orang miskin. Dimana standar yang dipakai oleh SMERU dalam mengukur garis kemiskinan adalah Rp.112/kapita/bulan. Sebuah ukuran setelah adanya kenaikan BBM pada tanggal 1 Oktober 2005. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alasan utama program BLT adalah alasan yang prioritas dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dimana jumlah orang miskin mencapai $\frac{1}{4}$ lebih dari seluruh total penduduk Indonesia.

Secara operasional perundang-undangan sebagai dasar pijak pelaksanaan program BLT adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kurun waktu 2004-2009, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang diantaranya memuat target penurunan angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Dimana target tersebut dianggap tercapai jika daya beli penduduk terus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Wujud nyata dari orientasi RPJM ini dan didorong oleh membengkaknya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar Internasional, yang tentu pula mempengaruhi harga BBM dalam negeri sejak awal Maret 2005, kemudian mempengaruhi juga

kenaikkan harga barang-barang pokok sehari-hari (Sembako), yang pada gilirannya memperlemah daya beli masyarakat, maka lahirlah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005, tentang "Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga-rumah tangga miskin", yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Dimana pembahasan lebih lanjut pada taraf pelaksanaannya melalui Rapat koordinasi (Rakor) tingkat Menteri pada tanggal 16 September 2005, yang memandang bahwa pelaksanaan BLT sudah siap dilaksanakan, maka berlangsunglah program ini pada bulan Oktober 2005.

Bagi SBY, BLT hanyalah program darurat. Presiden sadar, program pemberian bantuan langsung tunai jangan sampai membuat warga justru menjadi tergantung dalam jangka panjang. Untuk itu tahun 2007 pemerintah tidak membagikan lagi bantuan langsung tunai kepada semua warga miskin, tetapi sebagai gantinya pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai bersyarat. Artinya tidak semua warga miskin akan menerima bantuan langsung tunai bersyarat ini, hanya warga miskin yang memiliki anak usia sekolah, anak belum masuk usia sekolah atau ibu hamil dengan alasan uang yang diterima itu nantinya diharapkan akan digunakan untuk memasukkan anak ke sekolah, memeriksa anak ke Puskesmas atau memeriksa kesehatan ibu hamil ke Puskesmas.

Sebenarnya skema kompensasi BLT sendiri telah selesai sebelum BBM dinaikkan. Presiden SBY untuk memastikan hal ini sampai menunggu hingga detik terakhir sebelum menaikkan BBM agar efeknya dapat dikendalikan. Akhirnya, BLT langsung menjadi pelampung bagi rakyat miskin, begitu BBM diumumkan naik¹.

Kota Palopo merupakan salah satu kota di Indonesia yang mendapat program bantuan langsung tunai. Sebagian besar penerima bantuan langsung tunai adalah bukan penduduk asli kota Palopo melainkan pendatang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang kebetulan berdomisili untuk mencari nafkah.

Pada tahap pertama Sekitar 27.082 Rumah Tangga mendapat bantuan tersebut, dan itu sudah terdiri dari semua warga yang berhak menerima dari empat kecamatan yang ada di kota Palopo. Namun setelah tahap kedua (bantuan langsung tunai bersyarat) yang menerima bantuan hanya sekitar 9.421 Rumah Tangga, ini artinya jumlah Rumah Tangga yang menerima berkurang sekitar kurang lebih 30% dari jumlah sebelumnya.

¹Kurdi Mustofa & Zaenal A. Budoyono, *Visi, Misi & Solusi Tiga Tahun Pemerintahan SBY*, Jakarta, Yayasan Nida Utama, 2008, Hlm 14 & 17

Dalam pandangan sebagian masyarakat kota Palopo yang mendapat bantuan langsung tunai, menganggap implementasi dari kebijakan Bantuan Langsung Tunai itu tidak sesuai dengan mekanismenya maksudnya banyak warga yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan tersebut namun kenyataan yang ada mereka tidak mendapatkan bantuan, sebaliknya warga yang dianggap mampu dalam hal ini mereka yang tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin justru mendapatkan bantuan tersebut. Disini masyarakat menganggap bahwa ada unsur Nepotisme dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai tersebut. Maka dengan latar belakang pemikiran tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengungkap dan meneliti lebih jauh mengenai:

“Analisis implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo”

B. Rumusan Masalah

Adanya kebijakan bantuan langsung tunai di kota Palopo merupakan salah satu solusi yang mungkin akan membantu mengurangi beban masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga BBM, namun berbagai isu yang muncul ternyata hak yang diterima oleh sebagian masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai terasa belum dapat memenuhi harapan.

Maka dari alasan ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan BLT di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BLT di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka adapun mamfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang hendak dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam kajian mata kuliah yang berhubungan dengan kebijakan.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota Palopo maupun kota lainnya dalam mengefektifitaskan implementasi setiap kebijakan yang ada agar masyarakat merasa puas dengan kebijakan yang dilaksanakan.

C. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian implementasi kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep dasar yang menjadi landasan berfikir peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep Kebijakan Publik

Soerwargono (1996:1) dan Djohan (1998:161) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat,

pemerintah memiliki peranan yang penting dan menentukan. Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai defenisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Untuk memahami berbagai defenisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (lihat Young dan Quinn, 2002:5-6) :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang di buat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya



merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social. Namun, kebijakan publik biasa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bias dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Tabel Proses Kebijakan Publik

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	: Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting (Peramalan)	: Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan
Rekomendasi Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi
Monitoring Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari ¹ diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Sumber : AG. Subarsono (2005:9)

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau Dekrit Presiden). Van Horn dan Van Meter (dalam Abdul Wahab 1997) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun pihak swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Hartono (2002), implementasi kebijakan diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat Friedrich (dalam Abdul Wahab 1997) bahwa implementasi kebijakan merupakan "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Dari bahasan tentang konsep implementasi kebijakan publik seperti dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa konsep implementasi kebijakan terkait dengan bagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan dapat dicapai dengan berbagai indikator sasaran dan dampak yang diinginkan. Meskipun menurut Van Horn dan Van Meter maupun Friedrich mengungkap bahwa implementasi kebijakan hanya dapat diukur dari tujuan kebijakan yang disusun sebelumnya, namun pendapat tersebut secara implisit sejalan dengan pendapat Hartono yang menilai implementasi dari sisi dampaknya secara langsung.

3. Konsep Bantuan Langsung Tunai

BLT adalah dana subsidi langsung yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya untuk mengantisipasi pengaruh kenaikan BBM terhadap rumah tangga miskin, dimana BLT diberikan pada Rumah Tangga yang dikategorikan miskin menurut Data BPS (Badan Pusat Statistik). Adapun kriteria rumah tangga miskin menurut BPS adalah sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik
11. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 per bulan
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD

13. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000, seperti: sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Untuk Memperjelas arah dari penulisan skripsi ini peneliti menggambarkan skema dari kerangka konseptual sebagai berikut :



F. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah diangkat, yakni analisis implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di Kota Palopo, maka sudah jelas dan dapat dipastikan penelitian ini akan dilaksanakan di kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan.

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

a) Pertimbangan Eksternal

1. Kota Palopo merupakan salah satu kota dari tiga kota yang ada di Sulawesi Selatan
2. Kota Palopo yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mendapat program bantuan langsung tunai.

b) Pertimbangan Internal

Pertimbangan hasil penelitian yang efektif karena Kota Palopo adalah Kota tempat kelahiran peneliti.

b. Dasar pokok penelitian

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi terkait tentang implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di kota Palopo. Adapun dasar pokok penelitian yang digunakan adalah survei, yakni penelitian yang dilakukan untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan data dari lapangan (informan atau responden) yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

c. Populasi Penelitian

Sesuai dengan lokasi yang ditetapkan maka populasi dari penelitian ini adalah masyarakat miskin Kota Palopo.

d. Sampel Penelitian

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah warga kota Palopo yang mendapat BLT. Dalam penarikan sampel peneliti menggunakan tehnik **Local Area Sampling** yaitu penelitian yang dilakukan dalam suatu wilayah yang dalam penelitiannya menggunakan populasi yang kemudian dari populasi itu dibagi beberapa populasi lagi.

Dalam penelitian ini penelitian ini peneliti menggunakan 100 orang sebagai sampel. Adapun rinciannya :

1. Informan

5 orang dari kantor BPS selaku aparatur pengolah data dan 5 orang dari kantor Pos selaku aparatur pembagian dana BLT.

2. Responden

Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah 90 orang. Dalam pengambilan responden peneliti mengambil 3 kecamatan dari 9 kecamatan dan tiap kecamatan diambil 3 kelurahan dan tiap kelurahan diambil 10 orang penerima BLT.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian. Kesalahan dalam menggunakan teknik pengumpulan data dapat berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Sehingga hal ini menjadi sangat penting dalam menentukan tercapainya tujuan penelitian.

Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (**Library Research**)

Yaitu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori sebagai analisis dalam pemecahan masalah melalui literatur dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Studi Lapangan (**Field Research**)

Yaitu penelitian dimana peneliti terjun langsung dalam mengambil data. Studi lapangan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu mengadakan Tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

b. Angket (Kuisisioner)

Teknik pengumpulan data ini berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data yang diperlukan.

Dengan menggunakan beberapa teknik di atas, diharapkan data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis penelitian ini akan terpenuhi.

f. Definisi Operasional

Adapun penjabaran definisi konseptual dari masalah atau tujuan penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dikota Palopo

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 terhadap yang terfokus pada bantuan kepada masyarakat miskin akibat dari dampak kenaikan harga BBM. Adapun implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendataan warga miskin oleh BPS

- b. Pengolahan data oleh BPS
- c. Pembagian dana BLT oleh Kantor Pos

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan bantuan langsung tunai adalah

1. Kinerja Aparatur Pelaksana

Segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur pelaksana yang memiliki wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai.

Adapun indikatornya adalah :

- a. Pendataan oleh BPS
- b. Pengolahan data oleh BPS
- c. Pembagian BLT oleh Kantor Pos

2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat yang dimaksud disini Adalah peran serta masyarakat dalam memberikan sumbangsih baik dalam hal perbuatan maupun perkataan yang dapat mendukung dalam pencapaian tujuan Bantuan Langsung Tunai. Adapun indikatornya adalah :

- a. Informasi masyarakat tentang data warga miskin
- b. Tindakan masyarakat penerima BLT ketika pembagian

g. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan dan Kebijaksanaan

Para ahli kebijakan memberi arti kebijaksanaan (policy) bermacam-macam. Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan member arti "kebijaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah"

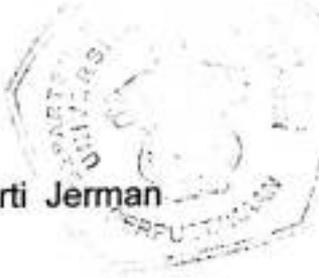
Carl J Friadrick mendefinisikan kebijaksanaan sebagai

"serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu",

Selanjutnya James E Anderson mengatakan bahwa :

"kebijaksanaan itu tidak lain diikuti dan dilaksanakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku".

Sedangkan William Dunn (2005 : 1-2), telah membeda arti kebijaksanaan secara etimologis. Berdasarkan konsep ini kebijaksanaan berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta adalah Polis (Negara- Kota) dan Pur (Kota) masuk kedalam bahasa latin menjadi politea (Negara), dan masalah publik atau administrasi pemerintah. Asal kata Policy sama dengan kata Policy dan Poitics.



Inilah sebabnya mengapa banyak bahasa moderen, seperti Jerman dan Rusia hanya memiliki satu kata (politik, politika).

Berdasarkan konsep ini pula, Inu Kencana Syafei, (2001 : 147) membedakan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Apa yang telah dituliskan oleh William Dunn tersebut telah membaurkan perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Baginya istilah kebijaksanaan berasal dari kata (Wisdom) bukan Policy, Karena kebijakan adalah apa yang diputuskan pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah Bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah.

Kelahiran sebuah kebijakan dalam sistem pemerintahan, bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Dalam perumusannya, merupakan proses yang melibatkan berbagai elemen dalam struktur maupun dari lingkungan luarnya. Faktor-faktor ini menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan, khususnya implementasi dan sampai pada proses evaluasinya.

Ketika dikaitkan dengan pemerintahan, menurut Taliziduhu Ndraha (2003 : 498)

"Kebijakan pemerintah dapat didefenisikan sebagai pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada keraifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan"

Pemerintah dalam menerapkan sebuah kebijakan, mesti pula memperhatikan secara khusus aspek motivasi yang menjadi landasan untuk membuat masyarakat menjalankannya. Motivasi ini juga yang oleh Strauss, sebagaimana dijelaskan Inu Kencan Syafei (2001 : 109)

"Bahwa bagaimana pemerintah (penguasa) memotivasi orang agar lebih giat melaksanakan kebijakan yang dimaksudkan agar tujuan yang diinginkannya tercapai".

Merujuk dari pandangan para ahli tersebut tentang pengertian kebijakan atau kebijaksanaan. Kebijakan lahir dari pembacaan kondisi social yang ada dan oleh pengambil kebijakan dirumuskan sebuah upaya penyelesaian untuk pencapaian tujuan bersama.

Dalam pelaksanaannya, Kebijakan dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari hal tersebut adalah menurut Irfan Islami, (2004 : 17-24).

1. Bahwa kebijaksanaan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakantindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola adalah tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Bahwa kebijaksanaan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu

4. Bahwa kebijaksanaan Negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
5. Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa atau otoritatif.

B. Analisis Kebijaksanaan

Untuk lebih jauh memahami kebijakan, dalam prakteknya digunakan metode analisis kebijakan. Analisis ini mengkaji kebijakan dan instrument-instrumen yang digunakan oleh pemerintah, khususnya aspek yang menjadi fokus implementasinya. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses adalah melakukan evaluasi kebijakan . Dalam hal ini beberapa ahli memberikan pendapatnya sebagai berikut :

James E Anderson mengatakan (1997 : 272) :

"Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri".

Menurut Irfan Islamy, (2004 : 114-115) :

"Evaluasi kebijakan adalah merupakan suatu aktifitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara "Policy Impact / outcome dan Policy Output. "Policy Impact/Outcome" adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan "Policy Output" adalah dari apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah"

Analisis kebijakan dalam arti luas sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan sebenarnya telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Usaha ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang paling sederhana dan irasional sampai kepada analisis ilmiah yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Semua itu ditujukan untuk membantu menemukan jawaban dan putusan yang tepat terhadap masalah yang dihadapi (Dunn, 1987 : 1)

Melalui analisis kebijakan, setiap satuan kebijakan pemerintah lantas dibedah secara sistematis dan terarah. Kematangan sebuah kebijakan dapat diukur sejauh mana analisis dari kebijakan itu digunakan. Kesadaran akan pentingnya analisis kebijakan telah membuahkan beberapa pedoman, aturan, dan prosedur yang terkodifikasi dan telah disepakati oleh para praktisi. Bahkan telah memiliki metodologi yang bertujuan menciptakan, menilai secara kritis

dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Analisis kebijakan dalam lingkup lembaga maupun individu(pejabat/pengambil keputusan), mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keberlangsungan proses pembangunan jangka panjang dan stabilitas jangka pendek. Analisis kebijakan memuat rekomendasi-rekomendasi keputusan yang digunakan untuk memecahkan, menciptakan stabilitas dan memperlancar pembangunan dengan tujuan menghindarkan dari dampak yang merugikan bagi kepentingan rakyat.

Analisis kebijakan merupakan rangkaian proses intelektual dari multidisipliner yang terbentuk kajian terapan untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang telah, sedang dan yang akan terjadi. Analisis kebijakan berfungsi sebagai pijakan awal yang memberikan argumentasi sebuah kebijakan yang diambil para pengambil keputusan

Analisis kebijakan sebagai proses intelektual mempunyai jangkauan analisis yang meliputi tahap awal yaitu menentukan isu kebijakan, menanalisis faktor pendukung kebijakan, pelaksanaan kebijakan, peluang evaluasi dan kondisi lingkungan.

Analisis kebijakan telah mengembangkan inti dasar teori yang kurang lebih mempunyai kaitan logis, beragam metode yang banyak

diterima oleh para praktisi, tradisi penerapan analisis kebijakan dan fakta-fakta baik yang sifatnya sistematis ataupun anekdot yang telah meningkatkan kemampuan klien dalam memecahkan.

Sedangkan analisis kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik (William N Dunn, 2000 : 1-6).

Perkembangan ilmu-ilmu sosial abad ini kian pesat, bahkan sebagian ahli kebijaksanaan telah berani mengklaim bahwa kebijaksanaan telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang menaungi analisis kebijaksanaan. Kebijaksanaan telah diupayakan sedemikian rupa untuk diilmiahkan, dalam terminology politik, kebijakan diartikan sebagai milik birokrat sedangkan dunia ilmiah dalam terminology penelitian adalah milik ilmuan. Upaya untuk menyelesaikan kesenjangan ini telah diperkirakan oleh sejumlah ahli sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan lebih banyak berwarna ilmiah ketimbang berwarna politik. Sebelum lebih jauh lagi terlebih dahulu kita akan membahas apa pengertian dari analisis kebijaksanaan ini sendiri.

Menurut Sudarwan Danin, 2006 : 26 bahwa :

Analisis kebijakan (Policy Analysis) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan ditampilkan secara tipikal oleh ilmuwan atau pakar politik yang berminat dengan proses dan kebijakan diadopsi sebagai efek-efek dari peristiwa-peristiwa politik.

Untuk memperjelas pembahasannya ia mengutip pandangan Lidbium (1986) tentang hal tersebut, Lidbium mengatakan bahwa : kita sering menjumpai teknik-teknik baru ini digunakan dalam proyek-proyek dengan nama analisis kebijaksanaan (Policy Analysis). Mesti kita menggunakan istilah analisis sebagai sebutan gampang bagi segala macam informasi, pembicaraan dan analisis tentang kebijaksanaan , istilah analisis kebijaksanaan biasanya menunjuk batasan yang lebih sempit sekitar bentuk-bentuk spesifik dari analisis professional. Dalam bentuknya yang terbaik suatu analisis kebijaksanaan merumuskan masalah kebijaksanaan sebagai sesuatu yang utuh, merinci sasaran dan nilainya, mengajukan dan mengevaluasi alternative pemecahan dan mengidentifikasi pemecahan yang paling erat berkaitan dengan nilai-nilai yang telah diformulasikan”.

Tak ketinggalan William N Dunn, 2003 : 1 dengan mengutip pandangan Harold Laswell ia menuliskan bahwa secara umum, analisis kebijaksanaan dapat dipahami sebagai cara untuk menghasilkan pengetahuan dan segala proses dalam kebijaksanaan. Ia pun menambahkan bahwa terdapat cirri-ciri yang menggambarkan pengetahuan yang relevan dengan kebijaksanaan, selain itu juga dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan itu dihasilkan, juga dari orientasi yang mendasar, pengetahuan adalah penuntun tindakan dan bukan tujuan itu sendiri.

Berdasarkan konsep di atas kita telah mampu merasakan arti penting analisis kebijaksanaan. Lindblom menyadari sepenuhnya bahwa analisis kebijakan juga memiliki kelemahan-kelemahan, seperti yang dituliskan oleh Sudarwan Danim, 2000 : 27, bagi Lindblom paling tidak kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilihat dari empat sisi yaitu:

1. Analisis tidak selalu benar atau dapat saja hal ini diakui oleh khalayak pemilik atau warga
2. Analisis tidak selamanya adaptif untuk menyelesaikan konflik antara nilai dan kepentingan
3. Proses kerja analisis lambat dan biaya mahal
4. Analisis tidak sepenuhnya dapat menunjukkan secara nyata masalah-masalah mana yang harus diselenggarakan oleh Negara

Analisis kebijaksanaan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasillkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan, sehingga dapat dimamfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan. Walaupun demikian, analisis kebijaksanaan hanya meliputi evaluasi kebijaksanaan dan anjurannya (*Policy Advocacy*). Analisis kebijaksanaan disadap dari berbagai disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat penandaan

(*Desingnative*), penilaian (*Evaluative*) dan anjuran (*Advocative*). Hal ini dikemukakan oleh William N Dunn, 2003 : 29-31.

Selanjutnya, tetap dalam buku yang sama, William N Dunn, 28. Mengutip deskripsi analisis kebijaksanaan ES Quade dengan harapan dapat membantunya untuk menerangkan arti analisis kebijaksanaan. ES. Quide bahwa setiap jenis analisis yang menghasilkan informasi dapat menjadi dasar bagi para pengambil kebijaksanaan di dalam menguji pendapat-pendapat mereka. Dalam analisis kebijaksanaan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum . Kata tersebut secara secara tidak langsung menunjukkan penggunaan institusi dan pertimbangan yang mencakup tidak hanya pengujian kebijaksanaan dengan pemecahan dalam komponen-komponennya, tetapi juga merencanakan dan mencari sintesis atas alternative-alternatif baru. Aktivitas-aktivitas ini meliputi penelitian untuk menjelaskan atau memberi Wawasan terhadap problem atau Issu yang mendahului atau untuk mengevaluasi program yang sudah selesai. Beberapa analisis bersifat informal yang tidak lebih hanya berupa pemikiran keras dan teliti, sedang yang lainnya memerlukan data yang luas, sehingga dapat dihitung dengan proses matematika yang rumit.

Penjelasan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa analisis kebijaksanaan memiliki ragam metode dalam penelitiannya. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah metode apa yang dapat menggambarkan secara spesifik tentang analisis kebijaksanaan. Memang analisis kebijaksanaan memiliki beragam kelemahan dan kekurangan, namun setidaknya hal tersebut dapat menjadi alternatif atau pilihan untuk dilakukan saat ini. Salah satu contoh seperti yang terjadi di sebuah Negara maju seperti Amerika Serikat, analisis yang berkaitan dengan Policy Analysis makin mapan (Establishment) dengan melibatkan banyak pihak seperti badan usaha swasta, organisasi sosial, universitas dan institusi penelitian yang menciptakan arus besar tentang studi kebijakan.

C. Konsep Implementasi

1. Pengertian implementasi

Dalam kamus Webster² pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "to implementasi" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

² Lihat kamus Webster, (Solihin Abdul Wahab, 1997:64).

Sementara studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones dimana implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jones, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus

dilakukan.³ Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*"

Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok). Selanjutnya Mazmanian

³ Lihat, Bambang Supriadi, *Implementasi Kebijakan Sektor Informal*, 2007.

dan Sabatier menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."⁴

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al, mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan. (*a model of the policy*

⁴ Ibid, , (Solihin Abdul Wahab, 1997:65).

implementation process). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Atas dasar pandangan seperti itu, Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut.⁵

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi

⁵ Ibid,



kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan.

Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain. Hubungan antar sumber daya (*resources*) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga

masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (implementor). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standars dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana implemementasi kebijakan yang efektif sangat

tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor implementor kebijakan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implelementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bernagai variabel atau faktor yang pada gilrannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri

2. Tahap-Tahap Impelementasi kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :⁶

1. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:⁷

⁶ M. Irfan Islami, 1997, hlm. 102-106.

⁷ Ibid, Solihin Abdul Wahab, 1991:36.

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- 1) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas ;
- 2) Menentukan standar pelaksanaan ;
- 3) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode ;

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

- 1) Menentukan jadwal ;
- 2) Melakukan pemantauan ;
- 3) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi

maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (*target grup*) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implelementasi kebijakan negara.⁸

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Geprge C⁹. ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

1. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-

⁸ Ibid,

⁹ Geprge C. dalam Edward III, Implementasi Public Policy, 1980 hal. 111.

sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

- a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
- b. Perintah;
- c. Anjuran atasan/pimpinan.

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana

yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

2. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

3. Faktor Komunikasi

Menurut Liang Gie Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "Bagaimana hubungan yang dilakukan".

4. Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

D. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

BLT atau Bantuan Langsung Tunai, adalah merupakan salah satu program Pemerintah Pusat, dalam membantu masyarakat miskin dalam menopang kehidupannya sehari-hari. Tentunya dengan adanya BLT ini pemerintah berharap masyarakat miskin bisa memanfaatkan dana BLT untuk kemajuan sehingga bisa mengurangi beban masyarakat miskin saat ini.

Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan tokoh-



tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan BBM sebesar 126 persen.

Disisi lain, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan adanya dana "cuma-cuma" yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi disisi yang lain kebijakan BLT ini memiliki dampak negatif yakni kebijakan ini akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat. Kebijakan ini sangat riskan menciptakan karakter masyarakat yang salalu dimanja dan menjadi bangsa "peminta-minta". Selain itu, permasalahan efektifitas dan efisiensi kebijakan ini juga sangat diragukan, apalagi kalau kita melihat bahwa landasan kenaikan BBM adalah kondisi deficit keuangan negara yang semakin membengkak (bertolak belakang dengan kebijakan BLT).

Kelemahan kebijakan BLT

Berkaca pada kebijakan BLT di masa lalu (kebijakan BLT tahun 2005) menurut Robby Alexander Sirait banyak

kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang akan ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain :

1. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintahan terhadap kebijakan tersebut
3. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak
4. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat
5. Peran aktif masyarakat yang kurang/minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan
6. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin

E. Kemiskinan

Sesuai dengan sasaran kebijakan pemerintah dalam pemberian kompensasi BBM adalah ditujukan kepada keluarga miskin. Secara umum pengertian kemiskinan diartikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan primer kehidupannya.

Menurut Poerwadarminto (1976) :

"Secara harfiah kata miskin berarti tidak berharta benda. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya"

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energy kalori sehingga kemungkinan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan. Selain kebutuhan makanan juga diperlukan kebutuhan lain yang minimal dipenuhi, yaitu meliputi tempat perlindungan (rumah) termasuk fasilitas penerangan, bahan bakar dan pemeliharannya, pakaian termasuk alas kaki, pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan perawatan pribadi beserta transportasi. Kuncoro dan Nugroho menyatakan bahwa kemiskinan didefinisikan

sebagai:

"Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup atau dengan kata lain ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu (makan, perumahan dan pakaian) maupun keperluan pelayanan social tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan"

Kemiskinan sebagai suatu fenomena social tidak hanya memiliki dimensi ekonomi tetap berdimensi banyak termasuk dimensi

psikologis, structural, politis dan lain-lain sebagainya. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sangat kompleks, bukan hanya menunjukkan penghasilan yang sangat rendah, kekurangan pangan, kondisi kesehatan yang buruk, dan lingkungan yang kumuh, tetapi juga merupakan ketidak berdayaan dan ketergantungan kepada pihak lain. Efektifitas dari kebijakan harus dilihat dari kemampuan program tersebut dalam berbagai kondisi diatas.

Kemiskinan merupakan kata yang berasal dari kata "miskin", miskin adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau ketidak mampuan memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lain-lain.

Secara konseptual kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi hidup yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan papan dan kebutuhan pendidikan dasar. Bila kriteria itu dikaitkan dengan tolak ukur garis kemiskinan maka penduduk miskin adalah golongan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kondisi absolute atau relative yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan

dasarnya sesuai dengan tata nilai, natural, cultural, structural (Nugroho dan Dahuri, 2004). Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma-norma dalam masyarakatnya. Tata nilai itu sangat dinamis, semakin lama mengarah pada sifat-sifat materialistis. Pandangan ini memperlihatkan luasnya cakupan tentang dimensi kemiskinan.

Dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan pada dasarnya memperlihatkan adanya suatu kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Hal tersebut implicit dengan keadaan :

- a. Kemiskinan mencerminkan keadaan rendahnya permintaan agregat system produksi
- b. Kemiskinan berhubungan dengan keadaan lokasi beragam sumber daya baik alam maupu manusia

Dipandang dari aspek social, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Di dalam masyarakat yang berkembang, aspirasi dan persepsi bersifat terbatas dan semu, serta mengutamakan atau mengutamakan pengambilan keputusan dalam horizon waktu yang pendek. Akibatnya, pengenalan pemikiran rasional yang kompeherensif tidak mudah, apalagi untuk mengubahnya.

Dipandang dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan lemahnya kemandirian masyarakat. Senantiasa tampak ketergantungan atau eksploitasi oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan bermuara kepada ketidakadilan atau kesenjangan. Keadaan kesenjangan yang terpelihara adalah berbahaya dan akan menghambat upaya penghapusan kemiskinan.

Secara teoritis fenomena kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu

1. Kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah, artinya factor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat yang menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan ada bukan bahwa akan ada kelompok atau individu dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan mendapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan patronclient, jiwa gotong royong dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan social.
2. Kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur social yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak

menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata, dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan buatan dalam banyak hal terjadi karena bukan seseorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena terus menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung menovonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan structural menurut Selo Soemartjan (1984), adalah kemiskinan yang diderita oleh golongan masyarakat, karena struktur social masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber dari lingkungan, oleh karena itu dapat dicari pada struktur social yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka termasuk kedalam golongan miskin yang tidak mampu memperbaiki hidupnya, struktur sosial yang berlaku secara turun temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka

mungkin hanya keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas social ekonomi di atasnya. Menurut Mohtar Mas ud (1994), buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, pedagang kecil tidak bisa mendapatkan harga yang layak atas barang yang mereka jual kesimpulannya pihak miskin relative tidak dapat berbuat atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternative pilihan untuk menentukan nasib kearah yang lebih baik.

Identifikasi penyebab kemiskinan saling kompleks dan saling terkait, yaitu : (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik motivasi mauun penguasaan manajemen dan teknologi, (2) kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan, (3) sarana dan prasarana yang belum merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, (4) minimnya modal, dan (5) berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada. (Sumodiningrat, 2007)

Emil Salim dalam Ala (1981:8-9) menjelaskan bahwa ada 5 ciri dari kemiskinan yaitu ;

1. Pada umumnya mereka tidak memilik factor produksi dan kurang memadai

2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan kekuatan sendiri
3. Tingkat pendidikan rendah
4. Banyak hidup di pedesaan dengan pekerjaan sebagai buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian
5. Bagi mereka di perkotaan pada umumnya berusia muda, tidak memiliki keterampilan atau pendidikan sehingga kota tidak mampu untuk menampung gerak/ arus urbanisasi penduduk dari pedesaan.

Ciri-ciri rumah tangga miskin di Indonesia, Tjiptohedjanto dalam Ibnussalam (2002) adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya memiliki anggota keluarga rumah tangga yang besar
2. Kepala rumah tangga merupakan pekerja rumah tangga
3. Tingkat pendidikan kepala dan anggota keluarga rumah tangga rendah
4. Sering berubah pekerjaan
5. Sebagian besar mereka yang telah bekerja namun masih menerima tambahan pekerjaan lain bila ditawarkan
6. Sumber penghasilan utama dari sektor pertanian

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986

Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo; Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi; Surat Gubernur Propinsi Sulawesi

Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo; Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo; Hasil Seminar Kota Administratip Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, lalu kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsii Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota (Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun , hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, untuk

memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.

Nilai-nilai

Visi dan Misi Kota Palopo yang merupakan arah dan pedoman dalam melahirkan konsepsi-konsepsi pembangunan Kota Palopo adalah kristalisasi dari pemikiran yang dalam tentang potensi/sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Palopo dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara pemerintahan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi Kota Palopo, seyogyanya diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, bahwa visi dan misi tersebut adalah merupakan bentuk dan keinginan bersama dalam rangka mencapai kemajuan bersama pula.

Adapun nilai-nilai yang dapat dipetik dari Visi Misi tersebut diatas, adalah :

1. Kota Palopo dalam kapasitasnya sebagai bekas pusat pemerintahan Kabupaten Luwu, dengan kondisi geografis yang berada pada lintas trans sulawesi memungkinkan menjadi pusat kegiatan dan transaksi perekonomian bagi daerah-daerah hinterland kota palopo.
2. Kota Palopo Sebagai daerah yang baru, mengembangkan pola pemerintahan yang berbasis pada pelayanan yang prima sebagai wujud *good governance*, sehingga dengan bentuk pelayanan yang baik

akan melahirkan kemudahan yang bermuara pada hadirnya para investor dan pemilik modal di kota Palopo untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Upaya untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang produktif, dengan melahirkan aparat - aparat pemerintahan yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang memadai dalam rangka menciptakan bentuk pelayanan yang mudah murah, ramah dan cepat.
4. Disadari, bahwa Kota Palopo saat ini tidak memiliki komoditas andalan yang bisa diunggulkan untuk bersaing, olehnya itu salah satu pasar unggulan yang dilirik adalah menjadikan Kota Palopo sebagai Kota Pelayanan Jasa.

B. Keadaan Geografi

1. Letak Geografi

Kota Palopo secara geografis terletak antara $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonomi Tanah Luwu, dimana di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan di bagian Baratnya dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

1. Luas Wilayah

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara Administrasi Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 kelurahan. Kota Palopo sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah seperti halnya dengan keberadaannya sebagai daerah pesisir pantai. Sekitar 62,85 persen dari total luas daerah Kota Palopo yang merupakan daerah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,76 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m dan 12,39 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m.

Tabel 3.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kota Palopo

Kecamatan	Luas (Km ²)	Perserntase (%)	Banyaknya Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Wara Selatan	10,66	4,31	4
Sendana	37,09	14,98	4
Wara	11,49	4,64	6
Wara Timur	12,08	4,88	7
Mungkajang	53,80	21,73	4
Wara Utara	10,58	4,27	6
Bara	23,35	9,43	5
Telluwanua	34,34	13,88	7
Wara Barat	54,13	21,88	5
Jumlah	247,52	100	48

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo.

C. Pemerintahan

1. DPRD

Sebagai kota kedua termuda dalam kapasitas sebagai daerah otonom di Tana Luwu Raya sebelah Luwu Timur, Kota Palopo telah membentuk DPRD Palopo yang dikenal dengan Lembaga Legislatif, yang duduk sebagai wakil seluruh rakyat Kota Palopo sekaligus berperan sebagai mitra kesejajaran dan mitra kerja lembaga eksekutif.

Anggota DPRD Palopo pada periode tahun 2005-2009 jumlahnya sebanyak 25 orang, sebagai wakil rakyat dalam kiprahnya untuk memikirkan kepentingan daerah ke arah yang lebih baik DPRD membagi diri menjadi 5 Fraksi.

2. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan komposisinya menurut Gender atau jenis kelamin yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu PNS dilinngkungan Pemerintah kota Palopo dan PNS yang bekerja pada Instansi yang berstatus Vertikal sesuai keadaan akhir tahun 2008 di kota Palopo.

Menurut informasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo (BPKD) bahwa sampai keadaan akhir tahun 2007 jumlah PNS yang ada pada Pemkot Palopo sebanyak 4.197



orang, yang terdiri dari 1.864 orang laki-laki dan 2.333 orang perempuan. Indikator ini menunjukkan bahwa di kota Palopo saat ini, emansipasi Wanita di dalam pemerintahan sudah lebih tinggi dibanding keterlibatan laki-laki.

D. Penduduk dan Ketenaga Kerjaan

1. Penduduk

Menurut hasil Survey Social Ekonomi Nasional Tahun 2007 penduduk Kota Palopo telah mencapai 137.595 jiwa, menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 67.389 jiwa dan perempuan sebanyak 70.206 jiwa. Dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 96, angka ini menunjukkan bahwa bilamana terdapat 100 penduduk perempuan ada 96 penduduk laki-laki.

Mengamati keadaan penduduk di setiap kecamatan kesannya adalah bahwa kepadatan penduduk sangat tidak merata atau cukup bervariasi.

Tabel 3. 2 Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin Dan Seks Rasio Di Kota Palopo

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Seks Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wara Selatan	4993	5010	10003	92
Sendana	3740	3778	7518	100
Wara	10891	11098	21989	97
Wara Timur	11360	11502	22862	96
Mungkajang	3811	3859	7670	100
Wara Utara	8244	8360	16604	94
Bara	9359	9505	18864	99
Telluwanua	6449	6614	13063	92
Wara Barat	4580	4651	9231	92
Jumlah	63427	63377	127802	96

Sumber : Badan Statistik Kota Palopo

1.1 Penduduk miskin

Jumlah penduduk miskin di kota Palopo adalah berjumlah 127.804 jiwa,.Kecamatan Wara 21989 jiwa, Wara Utara 16604 jiwa, Wara Selatan 10003 jiwa, Telluwanua 13063 jiwa, Wara Timur 22862 jiwa, Mungkajang 7670 jiwa, Bara 18864 jiwa, Sendana 7518 jiwa dan Wara Barat 9231 jiwa.

1.2 Penerima BLT

Pada tahap pertama Sekitar 27.082 Rumah Tangga mendapat Bantuan Langsung Tunai tersebut, dan itu sudah terdiri dari semua warga yang berhak menerima dari empat kecamatan yang ada di kota Palopo. Namun setelah tahap kedua (bantuan langsung tunai bersyarat) yang menerima bantuan hanya sekitar 9.421 Rumah Tangga, ini artinya jumlah Rumah Tangga yang menerima berkurang sekitar kurang lebih 30% dari jumlah sebelumnya.

2. Ketenaga Kerjaan

Ketenaga kerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu balas jasa faktor produksi. Akhir-akhir ini topic mengenai masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang.

Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedang bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

E. Sosial

1. Pendidikan

Strategi pembangunan kota Palopo adalah kota tujuh Dimensi, dengan menempatkan prioritas pertama adalah sebagai kota religi dan yang kedua adalah kota pendidikan, seperti dengan daerah lainnya juga mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh berbagai upaya telah dilakukan oleh PEMKOT kota Palopo dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan sektor pendidikan dari sektor lainnya. Keadaan pendidikan di kota Palopo jelas mengenai jumlah sekolah, guru/dosen dan murid selama kurun waktu 2006 sampai 2008 pada seluruh jenjang pendidikan pra sekolah hingga perguruan tinggi.

**Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Miskin Dirinci Kecamatan se Kota Palopo
Keadaan TSahun 2009**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wara Selatan	4993	5010	10003	2589
Sendana	3740	3778	7518	3674
Wara	10891	11098	21989	5040
Wara Timur	11360	11502	22862	1388
Mungkajang	3811	3859	7670	2647
Wara Utara	8244	8360	16604	5052
Bara	9359	9505	18864	5955
Telluwana	6449	6614	13063	6477
Wara Barat	4580	4651	9231	4024
Jumlah	63427	63377	127804	41092

Sumber : Badan Statistik Kota Palopo

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Pada Bab ini sengaja ditulis karakteristik responden untuk membantu peneliti dalam kesempurnaan penelitian mengingat dari syarat-syarat penerima BLT yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dengan melihat karakteristik responden kita bisa mengetahui apakah penerima BLT yang sekarang betul-betul penerima yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah :

A.1. Umur

Umur dari responden penerima BLT di kota Palopo mulai dari umur yang belasan tahun sampai umur tujuh puluhan tahun artinya masyarakat yang menerima BLT bervariasi dari segi usia, ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Dari Segi Umur

Umur	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ persen
15-30 tahun	21	23,3	23,3	23,3
31-45 tahun	32	35,6	35,6	58,9
46-60 tahun	31	34,4	34,4	93,3
61-75 tahun	6	6,7	6,7	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Berdasarkan hasil penelitian pada data tabel 4.1 persentase usia responden kota Palopo yang menerima BLT yang paling banyak adalah usia responden 31-45 tahun yaitu 35,6 %, ini artinya penerima BLT adalah orang yang sudah berkeluarga. Jadi sangat wajar responden yang menerima BLT dalam usia demikian sebab dana itu akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Selanjutnya penerima BLT yang usia 15-30 tahun (23,3 %), usia 46-60 tahun (34,4 %) dan usia 61-70 tahun (6,7 %). Dari data tersebut terlihat bahwa responden kota Palopo yang menjadi sampel dalam penelitian ini cukup variatif dari segi umur.

A.2. Pendidikan Terakhir

Dari segi pendidikan dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi lapangan pekerjaan masyarakat kota Palopo, sehingga dengan melihat jenjang pendidikannya kita dapat melihat kelayakan pekerjaannya dan dari kelayakan tersebut dapat diketahui berapa penghasilan sehingga dengan penghasilan itu disesuaikan dengan syarat-syarat penerima BLT yang sudah dibahas sebelumnya.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Dari Segi Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ persen
Tidak Sekolah	6	6.7	6.7	6.7
SD Kebawah	48	53.3	53.3	60.0
SLTP	19	21.1	21.1	81.1
SLTA	15	16.7	16.7	97.8
D1-D3	2	2.2	2.2	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Melihat dari hasil penelitian tabel 4.2 diatas kita dapat mengetahui bahwa penerima BLT terbanyak adalah penduduk yang memiliki pendidikan SD Kebawah yaitu 53,3 %, yang tidak sekolah 6,7 %, tamat SLTP 21,1 %, Tamat SLTA 16,7 % dan tamatan D1-D3 2,2%, dari data tersebut sudah dapat diketahui bahwa memang yang berhak menerima BLT sudah sesuai karena faktor pendidikan mereka sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya bisa membantu dalam pemenuhan kebutuhan yang layak.

A.3. Pekerjaan Utama

Pekerjaan masyarakat Kota Palopo sangat bervariasi namun yang dibahas pada bab ini hanya pekerjaan masyarakat Kota Palopo yang memiliki pendapatan perbulannya dibawah standar dan tidak tetap sesuai dengan pekerjaan dan penghasilan yang menjadi persyaratan penerima BLT.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Dari Segi Pekerjaan.

Pekerjaan	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ Persen
Tidak Bekerja	42	46,7	46,7	46,7
Petani	23	25,6	25,6	72,2
Wiraswasta	25	27,8	27,8	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Pada hasil penelitian tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa penerima BLT terbanyak adalah masyarakat kota Palopo yang tidak memiliki

pekerjaan yaitu 46,7 %, petani 25,6 % dan wiraswasta 27,8 % artinya disini pemerintah sudah sesuai menetapkan nama-nama penerima BLT di Kota Palopo dan ini sudah membantu masyarakat yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilan yang tidak bisa membantu dalam pemenuhan kebutuhan mereka dalam program BLT tersebut

B. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo

Proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan bukanlah hal yang yang mudah dan sederhana. Pelaksanaan suatu kebijakan bukanlah semata-mata untuk kepentingan politis saja. Akan tetapi, kebijakan harus harus berimplikasi pada kesejahteraan hidup masyarakat, meringankan penderitaan rakyat apalagi setelah adanya pengumuman kenaikan harga BBM pada oktober 2005. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, secara benar dan juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tidak bisa dimungkiri bahwa sasaran utama penyaluran bantuan langsung tunai adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan setidaknya memenuhi belasan kriteria kemiskinan. Penyaluran BLT tahun sebelumnya juga dinilai berhasil karena lebih dari 80 persen dana tersalurkan tepat ke sasaran: warga miskin, atau yang kini juga disebut sebagai RTS, rumah tangga sasaran.

Artinya, secara teknis, program tersebut cukup sukses, yakni menyalurkan dana untuk mereka yang membutuhkan. Walaupun ada kebocoran dana, jumlahnya tidak terlalu banyak dan dengan mekanisme pengambilan via kantor pos, maka kebocoran tersebut akan dapat dikurangi sekecil mungkin.

Meskipun demikian, memahami kerangka kebijakan BLT bukanlah sekedar pelaksanaan teknis saja. Kebijakan BLT ini sesungguhnya telah menimbulkan polemik yang panjang, yang banyak menghabiskan energi, yang sesungguhnya energi tersebut dapat kita salurkan pada isu lain yang lebih produktif.

Kota Palopo adalah salah satu Kota penerima Bantuan Langsung Tunai. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini diterima dengan baik oleh masyarakat yang kurang mampu karena kebijakan ini dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan walaupun dana yang diterima dalam jumlah yang kecil yaitu Rp. 100.000 per bulannya. Ini sesuai data penelitian kuisisioner yang menunjukkan bahwa besarnya persen masyarakat yang setuju bahwa dana BLT itu membantu masyarakat yang kurang mampu di kota Palopo dan setuju dengan adanya BLT itu sendiri di Palopo.

Tapi pada pelaksanaannya memang tidak semulus yang di perkirakan, buktinya sampai saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan, yang sudah tentu masalah itu timbul di pada tingkat

pelaksanaannya. Seperti halnya banyak warga yang sudah di data dan termasuk pada golongan yang menerima dana BLT, tapi nyatanya masih banyak yang belum tercantum dalam data penerima dana BLT, hal ini sudah jelas akan menjadi permasalahan dan pemerintah paling bawah dalam hal ini pemerintah desa yang harus menanggung resikonya.

BLT bukan suatu program yang jelek, BLT merupakan program Pemerintah yang bisa langsung menyentuh masyarakat miskin di Indonesia. Tapi program ini hendaknya di sempurnakan dengan lebih bijak dan lebih berwawasan kedepan. Program BLT masih punya kekurangannya, diantaranya adalah mekanisme pendataan kategori miskin yang masih banyak di permasalahan ke obyektifannya, kedua program ini pun dinilai masih tidak mendidik masyarakat kita.

Jika sebuah kebijakan dilihat sebagai suatu proses, maka pusat perhatian akan tertuju pada siklus kebijakan, yang pada umumnya meliputi tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997). Kebijakan yang telah diformulasikan dan dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti apabila Linebery (1978) berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai.

Dalam Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo, yang merupakan indikator implementasi kebijakan adalah :

A. Pendataan Warga Miskin Oleh Badan Pusat Statistik

Untuk mendapatkan data keluarga miskin, pemerintah kemudian menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertanggung jawab dalam melakukan pendataan keluarga miskin yang layak mendapat dana BLT.

Khusus pelaksanaan BLT kepada RT miskin, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) tentang BLT kepada RT Miskin yang dikeluarkan pada 10 September 2005. Dalam Inpres tersebut, BPS ditugaskan :

1. Mengkordinasikan kegiatan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin
2. Memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.

Pendataan warga miskin adalah satu tugas dari Badan Pusat Statistik, dari data-data yang dihasilkan ini akan sangat membantu dalam pengimplementasian kebijakan Bantuan Langsung Tunai. Karena dari data inilah yang akan dijadikan dasar dari masyarakat yang akan menerima BLT, sehingga jika ada kesalahan

dalam pendataan akan menimbulkan masalah dalam mengimplementasikan kebijakan itu.



Pendataan keluarga/rumah tangga untuk kepentingan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai dikenal dengan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05). Dalam pelaksanaan tersebut, BPS dibantu oleh mitra kerja lapangan yang ditentukan oleh BPS, yang kemudian disebut pencacah. Tugas pencacah adalah membantu BPS dalam pendataan warga miskin. Pencacah yang direkrut BPS dari berbagai latar belakang, yaitu kader BKKBN, karang taruna, pegawai kelurahan, serta mitra lain yang biasa dipekerjakan oleh BPS untuk kegiatan pendataan sebelumnya.

Proses penjangkauan/pendataan keluarga rumah tangga miskin secara umum berlangsung dengan cara :

1. Pencacah meminta daftar keluarga rumah tangga miskin kepada ketua RT setempat yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar keluarga rumah tangga miskin dari sumber lain (data keluarga/rumah tangga miskin dari kecamatan, dinas social dan BKKBN) dan kemudian petugas melakukan observasi langsung ke masing-masing rumah untuk menilai layak tidaknya diajukan sebagai keluarga rumah tangga miskin yang diduga miskin sesuai dengan kriteria penduduk miskin

2. Daftar yang sudah dinilai diserahkan kepada petugas BPS untuk dilakukan verifikasi secara kasat mata guna menentukan keluarga rumah tangga yang layak untuk didata sebagai keluarga/rumah tangga miskin
3. Pencacah menerima daftar keluarga rumah tangga layak didata yang kemudian dicacah dengan menggunakan formulir PSE05

Formulir PSE05 memuat 20 pertanyaan, dalam pertanyaan itu memuat tentang 14 variabel kriteria penduduk miskin yaitu ; Tentang Luas bangunan, jenis lantai rumah, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging ayam dan susu dalam seminggu, frekuensi makan sehari, jumlah stel pakaian baru dalam setahun, akses berobat ke puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan kepemilikan aset keluarga. Selain indikator itu terdapat pula empat variable lain pendukung yaitu tentang keberadaan balita dalam keluarga, anak usia sekolah, keikutsertaan KB dan penerimaan kredit usaha.

Dari keempat belas variabel atau indikator yang digunakan diatas, apabila dalam satu keluarga/rumah tangga tidak memenuhi minimal setengahnya, maka keluarga /rumah tangga tersebut tidak layak untuk mendapat bantuan langsung tunai. Hal tersebut

sebagaimana yang telah disampaikan oleh pegawai BPS Muh. Ali
Anda bahwa :

Jika ada keluarga/rumah tangga tidak memenuhi kriteria penduduk miskin minimal sembilan dari empat belas indikator yang telah ditentukan maka keluarga/rumah tangga tersebut tidak digolongkan sebagai penerima bantuan langsung tunai

Dari kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS, masyarakat menganggap kegiatan itu perlu dilakukan karena dari data itu bisa membantu mengetahui keluarga/rumah tangga mana yang layak mendapat dana bantuan langsung tersebut. Dan jika dalam pendataan ada unsur KKN maka akan mempengaruhi proses implementasi.

Berikut ini hasil kuisisioner peneliti tentang pandangan masyarakat Kota Palopo penerima BLT dalam pendataan yang dilakukan oleh BPS karena dari pendapat masyarakat itu kita juga bisa mengetahui pelaksanaan kebijakan BLT di Kota Palopo

Tabel 4.4 Pendapat Masyarakat Terhadap Pendataan Warga Miskin Yang Dilakukan Oleh BPS

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ Persen
Tidak Bagus	5	5,6	5,6	5,6
Kurang Bagus	10	11,1	11,1	16,7
Bagus	75	83,3	83,3	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Dari data penelitian tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat penerima BLT di kota Palopo mengatakan kinerja BPS sudah bagus karena 83,3 % masyarakat penerima BLT mengatakan bagus, 5,6 % mengatakan tidak bagus dan 11,1 % mengatakan kurang bagus. Menurut hasil penelitian masyarakat mengatakan kinerja BPS bagus karena data-data warga miskin sudah sesuai, namun masyarakat penerima BLT yang mengatakan tidak bagus atau kurang bagus menganggap bahwa pendataan tidak merata karena semestinya ada warga yang berhak mendapatkan namun kenyataannya tidak mendapatkan bantuan itu. Namun memperhatikan hasil dari Wawancara dengan pegawai BPS melakukan pendataan langsung bahwa pendataan sudah dilakukan sebagaimana mestinya dan data-data yang diberikan adalah hasil data yang sebenarnya.

Disini kita bisa melihat bahwa kinerja BPS itu sudah maksimal dengan melihat jumlah masyarakat yang mengatakan setuju dan pendapat dari Pegawai BPS yang melakukan pendataan.

B. Pengolahan Data Oleh Badan Pusat Statistik

Pengolahan data yang dimaksud disini adalah data yang didapat dari lapangan kemudian disaring dengan mencocokkan syarat-syarat penerima BLT untuk menghasilkan nama-nama penerima BLT.

Proses pengolahan data yang dilakukan BPS adalah:

1. Data yang telah didapatkan dari hasil pendataan dalam hal ini formulir PSE05 yang telah diisi kemudian dilakukan pengolahan data sementara di BPS Kota
2. Data yang sebelumnya telah dikelola sederhana kemudian diserahkan ke BPS provinsi untuk di-entry dan hasilnya dikirim ke BPS pusat untuk dilakukan perhitungan skor dalam rangka penetapan keluarga/rumah tangga sasaran.

Pada proses pengolahan data yang dilakukan oleh BPS adalah indikator pelaksanaan yang mendapat tanggapan negatif dari masyarakat penerima BLT atau masyarakat kurang setuju dengan kinerja BPS dalam pengolahan data karena masyarakat menganggap ada unsur Nepotisme yang dilakukan oleh BPS dalam menentukan nama-nama keluarga/rumah tangga sasaran penerima BLT.

Berdasarkan data dari BPS yang telah dikelola bahwa keluarga/rumah tangga miskin yang layak untuk mendapat kompensasi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk kota Palopo secara keseluruhan adalah Pada tahap pertama Sekitar 27.082 Rumah Tangga dan 9.421 rumah tangga pada tahap kedua. Artinya dari 127.804 rumah tangga miskin yang mendapat dana BLT hanya sekitar seperlima dari jumlah tersebut.

Menurut salah seorang pegawai BPS tidak semua penduduk miskin yang ada di kota Palopo yang memenuhi keempat belas variabel/indikator sehingga dalam pengolahan data hanya seperlima saja dari jumlah penduduk miskin yang ada di kota Palopo yang mendapat dan bantuan langsung tunai. Namun penduduk miskin yang lain yang tidak mendapat BLT akan dibantu dengan program pengentasan kemiskinan yang lain Beras Miskin (Raskin) dan pengobatan gratis.

Untuk memperjelas analisis pelaksanaan kebijakan BLT di Kota Palopo Berikut ini adalah hasil penelitian kuisisioner pandangan masyarakat terhadap pengolahan data yang dilakukan oleh BPS :

Tabel 4.5 Pendapat Masyarakat Terhadap Pengolahan Data Yang Dilakukan Oleh BPS

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ Persen
Tidak Bagus	7	7,8	7,8	7,8
Kurang Bagus	33	36,7	36,7	44,4
Bagus	50	55,6	55,6	
Total	90	100	100	100

Sumber :Data primer 2009

Melihat data penelitian tabel 4.5 di atas tentang pengolahan data yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa masyarakat 7,8 % masyarakat penerima BLT mengatakan tidak bagus, 36, 7 % mengatakan kurang bagus dan 55,6 % mengatakan bagus. Disini masyarakat penerima BLT yang mengatakan tidak setuju atau kurang

setuju menganggap bahwa pengolahan data yang dilakukan oleh BPS ada unsur KKN bahwa penerima BLT adalah kebanyakan kerabat dari pendata sendiri. Namun ini berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Kepala BPS, Muh. Naing, SE yang mengatakan bahwa :

pengolahan yang dilakukan adalah murni dan nama-nama penerima BLT yang dihasilkan adalah dari hasil data yang dikelola yang didapat dari masyarakat yang disesuaikan dengan syarat-syarat penerima BLT tanpa mengurangi atau menambahkan data tersebut.

Melihat dari pernyataan diatas bisa dilihat bahwa kinerja BPS sudah maksimal dalam pengolahan data, walaupun ada juga masyarakat yang mengatakan setuju dan kurang setuju. Dan disini juga peneliti mengamati di lapangan bahwa masyarakat penerima BLT memang masyarakat yang pantas menerima BLT.

C.Pembagian dana BLT oleh Kantor Pos

Pengiriman dana bantuan langsung tunai dari Kantor Kas Negara melibatkan beberapa instansi, yaitu BRI dan PT POS. Penyaluran dana antar instansi ini secara umum berjalan lancar. Dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari pemerintah dan disimpan di BRI, dikirim ke Kantor Pos. Kantor Pos kemudian mendistribusikan dana tersebut ke masyarakat.

Pembagian dana BLT adalah proses akhir dari pelaksanaan dari kebijakan BLT tersebut. Disini, kantor pos hanya selaku sebagai sarana dalam pembagian dana BLT. Namun kinerjanya juga menjadi sasaran yang harus diteilti dalam implementasi kebijakan BLT khususnya dalam pelayanan pada saat pembagian dana BLT.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pembagian dana BLT, yaitu

1. Kemudahan memperoleh dana BLT
2. Pelayanan pada saat pembagian
3. Kecepatan pada saat pembagian
4. Ketepatan waktu pembagian

Pencairan dana kepada keluarga/rumah tangga penerima BLT dilakukan secara bergiliran selama beberapa hari. Dalam penerimaan setiap harinya telah ditentukan kelurahan-kelurahan mana saja yang akan mencairkan dana tersebut. Dalam penerimaan itu kelurahan yang menerima adalah satu kecamatan.

Melihat antusiasme warga miskin dalam pengucuran BLT ini, terlihat bahwa warga miskin sangat membutuhkan bantuan ini. Bagi mereka BLT adalah berkah, ia (BLT) datang di saat yang tepat. Seperti seteguk air di tengah gurun pasir. . Ini menunjukkan bahwa BLT benar-benar mereka butuhkan.

Proses pencairan dana bantuan langsung tunai berjalan lancar dan menggunakan waktu relatif cepat yaitu hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit dalam pencairan dana bantuan langsung tunai, sebagaimana yang disampaikan oleh para penerima dana bantuan tersebut. Hal ini karena kantor pos telah memiliki daftar nama penerima bantuan langsung tunai dari Badan Pusat Statistik, sehingga pada waktu pengambilan dana, petugas tinggal mencocokkan nama yang tertera dalam KKB yang disodorkan penerima.

Untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai, penerima hanya diminta untuk menunjukkan KKB(Kartu Kompensasi BBM) yang selanjutnya diperiksa keasliannya oleh petugas. Kecepatan proses pencairan dana tersebut terutama karena petugas tidak memeriksa bukti diri para pemegang KKB. Penyerahan dana dilakukan oleh kantor pos ketika penerima menunjukkan KKB disertai KTP atau SIM. Hal ini sesuai pesan pemerintah agar semua instansi selaku aparatur pelaksana tidak mempersulit keluarga miskin. Adapun jika penerima tidak menunjukkan KTP atau SIM, penerima hanya disuruh mengambil surat keterangan dari kelurahan. Ini dikhawatirkan agar penerima BLT adalah penerima yang sebenarnya. Pihak kantor pos juga sudah sepenuhnya mempercayai daftar yang diberikan oleh

BPS. Kantor pos hanya mensyaratkan bahwa setiap penerima hanya boleh membawa satu KKB untuk mempermudah pengontrolan.

Bagi para penerima BLT, pencairan dana ke kantor pos mengatakan tidak masalah. Walaupun ada beberapa kelurahan yang jaraknya dengan kantor pos sedikit jauh. Dana bantuan langsung tunai yang diterima di kantor pos diterima secara utuh sebesar Rp. 300.000, tanpa potongan. Adapun jika ada potongan tergantung dari penerima yang mau memberikan kepada orang yang menguruskan dalam hal ini ketua RT, namun dalam jumlah uang yang tidak besar dan bersifat sukarela. Dana tersebut menurut penerimanya dapat membantu menutupi kekurangan biaya hidup selama beberapa hari.

Adapun hasil kusioner penelitian tentang kinerja kantor pos adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Pendapat Masyarakat Terhadap Kemudahan Dalam Penerimaan Dana BLT

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Tidak Mudah	3	2,2	2,2	2,2
Kurang Mudah	1	1,1	1,1	3,3
Mudah	87	96,7	96,7	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Pada hasil penelitian tabel 4.6 menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat penerima BLT mengatakan mudah dalam penerimaan BLT yang dilakukan oleh kantor POS karena 96,7 % masyarakat

penerima BLT mengatakan mudah dalam penerimaan, 2,2 % mengatakan tidak mudah dan 1,1 % mengatakan kurang mudah.

Tabel 4.7 Pendapat Masyarakat Terhadap Pelayanan Dalam Penerimaan Dana BLT

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ Persen
Tidak Memuaskan	1	1,1	1,1	1,1
Kurang Memuaskan	1	1,1	1,1	2,2
Memuaskan	88	97,8	97,8	
Total	90	100	100	100

Sumber : Olah data primer 2009

Pada hasil penelitian tabel 4.7 menunjukkan juga hampir semua masyarakat penerima BLT mengatakan pelayanan yang dilakukan oleh kantor POS dalam penerimaan dana BLT memuaskan ini terbukti dari 97,8 % mengatakan memuaskan, 1,1 % mengatakan tidak memuaskan dan 1,1 % juga mengatakan kurang memuaskan.

Tabel 4.8 Pendapat Masyarakat Terhadap Kecepatan Dalam Penerimaan Dana BLT

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ Persen
Tidak Cepat	1	1,1	1,1	1,1
Kurang Cepat	2	2,2	2,2	3,3
Cepat	87	96,7	96,7	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Dari hasil penelitian tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat penerima BLT mengatakan pelayanan yang dilakukan oleh kantor Pos dalam penerimaan cepat karena 96,7 %

masyarakat penerima BLT mengatakan cepat, 1,1 % mengatakan tidak cepat dan 2,2 % mengatakan kurang cepat.

Tabel 4.9 Pendapat Masyarakat Terhadap Ketepatan Dalam Penerimaan Dana BLT

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Tidak tepat	1	1,1	1,1	1,1
Kurang tepat	1	1,1	1,1	2,2
Tepat	87	97,8	97,8	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Melihat dari hasil penelitian tabel 4.9 menunjukkan bahwa hampir juga semua masyarakat mengatakan pelayanan yang dilakukan oleh kantor POS dalam ketepatan sudah tepat terbukti dari hasil penelitian 97,8 % masyarakat penerima BLT mengatakan tepat, 1,1 % mengatakan tidak tepat dan 1,1 % juga mengatakan kurang tepat.

Dari beberapa hasil penelitian tabel diatas tentang kinerja Kantor Pos dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Polopo masyarakat yang menerima BLT hampir semuanya setuju dengan kinerja Kantor Pos dalam pembagian dana BLT artinya kinerja Kantor Pos dalam pembagian sudah maksimal.

Salah satu maksud dikeluarkannya Inpres No. 12 Tahun 2005 tanggal 10 September 2005, yang selanjutnya dibahas dalam Rakor tingkat Menteri tanggal 16 September 2005, pemerintahan SBY-JK mengharapkan agar realisasi program BLT dapat berjalan dengan

sistematis, lancar, berhasil, dan tepat sasaran. Dari melihat data diatas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo sesuai dengan maksud dikeluarkan kebijakan tersebut.

Sebagai bahan penunjang dalam penelitian berikut ini adalah pendapat masyarakat terhadap kegunaan dana BLT dan pelaksanaan kebijakan BLT di Kota Palopo :

Tabel 4.10 Pendapat Masyarakat Terhadap Kegunaan Dana BLT

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ Persen
Tidak Membantu	5	5,6	5,6	5,6
Kurang Membantu	6	6,7	6,7	12,2
Membantu	79	87,8	87,8	
Total	90	100	100	100,0

Sumber : Data primer 2009

Dari hasil penelitian tabel 4.10 di atas kita bisa melihat dana BLT itu membantu masyarakat kota Palopo karena 87.8 % responden mengatakan membantu, 5,6 % mengatakan tidak membantu dan 6,7 % mengatakan kurang membantu. Disini bisa dilihat adanya kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan walaupun dananya dalam jumlah yang sedikit.

Tabel 4.11 Pendapat Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ Persen
Tidak Setuju	1	1,1	1,1	1,1
Kurang Setuju	3	3,3	3,3	4,4
Setuju	86	95,6	95,6	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Dari hasil penelitian tabel 4.11 diatas masyarakat setuju dengan adanya kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo karena 95,6 % masyarakat penerima BLT mengatakan setuju, 1,1 % mengatakan tidak setuju dan 3,3 % masyarakat mengatakan kurang setuju. Artinya disini pendapat masyarakat penerima BLT tidak bervariasi.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan kegiatan yang luas dan kompleks yang biasanya direalisasikan dalam satu program. Kegiatan ini tidaklah sekedar menerapkan ketentuan-ketentuan, cara-cara dan sarana yang dicantumkan dalam program kebijakan, akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan kebijakan itu.

Kebijakan yang telah dibuat akan tidak mempunyai arti apa-apa atau hanya merupakan rangkaian kata-kata yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak dilaksanakan. Sehingga, bisa

Tabel 4.11 Pendapat Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Tidak Setuju	1	1,1	1,1	1,1
Kurang Setuju	3	3,3	3,3	4,4
Setuju	86	95,6	95,6	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Dari hasil penelitian tabel 4.11 diatas masyarakat setuju dengan adanya kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo karena 95,6 % masyarakat penerima BLT mengatakan setuju, 1,1 % mengatakan tidak setuju dan 3,3 % masyarakat mengatakan kurang setuju. Artinya disini pendapat masyarakat penerima BLT tidak bervariasi.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan kegiatan yang luas dan kompleks yang biasanya direalisasikan dalam satu program. Kegiatan ini tidaklah sekedar menerapkan ketentuan-ketentuan, cara-cara dan sarana yang dicantumkan dalam program kebijakan, akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan kebijakan itu.

Kebijakan yang telah dibuat akan tidak mempunyai arti apa-apa atau hanya merupakan rangkaian kata-kata yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak dilaksanakan. Sehingga, bisa

Tabel 4.11 Pendapat Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ Persen
Tidak Setuju	1	1,1	1,1	1,1
Kurang Setuju	3	3,3	3,3	4,4
Setuju	86	95,6	95,6	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Dari hasil penelitian tabel 4.11 diatas masyarakat setuju dengan adanya kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo karena 95,6 % masyarakat penerima BLT mengatakan setuju, 1,1 % mengatakan tidak setuju dan 3,3 % masyarakat mengatakan kurang setuju. Artinya disini pendapat masyarakat penerima BLT tidak bervariasi.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kota Palopo.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan kegiatan yang luas dan kompleks yang biasanya direalisasikan dalam satu program. Kegiatan ini tidaklah sekedar menerapkan ketentuan-ketentuan, cara-cara dan sarana yang dicantumkan dalam program kebijakan, akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan kebijakan itu.

Kebijakan yang telah dibuat akan tidak mempunyai arti apa-apa atau hanya merupakan rangkaian kata-kata yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak dilaksanakan. Sehingga, bisa

dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan pemerintah terletak proses pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo dapat dilihat dari tanggapan masyarakat dan aparatur pelaksana itu sendiri terhadap pelaksanaan kebijakan itu di kota Palopo, tanggapan itu harus dilihat dari faktor-faktor berikut, yaitu :

C.1. Kinerja Aparatur Pelaksana

Segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur pelaksana yang memiliki wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan prosedur dalam penerimaan BLT. Kinerja aparatur pelaksana sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengimplementasian kebijakan BLT. Menurut Geprge ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan kinerja aparatur pelaksana adalah faktor sumber daya dan birokrasi. Adapun Kinerja aparatur pelaksana tersebut adalah :

1. Pendataan Warga Miskin Oleh BPS
2. Pengolahan Data Oleh BPS
3. Pembagian Dana BLT Oleh Kantor Pos

C.1.1 Pendataan Warga Oleh Badan Pusat Statistik

Pendataan warga adalah langkah awal dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai karena data yang dihasilkan inilah yang akan menjadi dasar dalam implementasi kebijakan itu.

Sesuai dengan hasil data penelitian tabel 4.7 pada pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat penerima BLT di kota Palopo mengatakan kinerja BPS bagus karena 83,3 % masyarakat penerima BLT mengatakan bagus, 5,6 % mengatakan tidak bagus dan 11,1 % mengatakan kurang bagus. Dengan melihat persentase masyarakat penerima mengatakan setuju 83,3 % maka bisa diketahui Pendataan warga miskin yang dilakukan oleh BPS membantu implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo karena jika dalam pendataan tidak dilakukan sesuai dengan prosedurnya maka implementasi tidak akan akan berjalan dengan baik.

C.1.2. Pengolahan Data Oleh Badan Pusat Statistik

Setelah pendataan yang dilakukan oleh BPS, kemudian BPS kembali mempunyai tugas yaitu mengolah data, data yang dikelola ini yang akan menghasilkan nama-nama keluarga/rumah tangga sasaran penerima bantuan langsung tunai.

Melihat data penelitian tabel 4.8 pada pembahasan sebelumnya diatas menunjukkan bahwa masyarakat 7,8 % masyarakat penerima BLT mengatakan kinerja BPS dalam pengolahan data bagus, 36,7 % mengatakan kurang bagus dan 55,6 % mengatakan bagus. Dari melihat persentase masyarakat yang mengatakan setuju dengan pengolahan data yang dilakukan BPS yaitu 55,6 % bisa dikatakan

pengolahan data yang dilakukan BPS kurang membantu dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai, namun memperhatikan tanggapan dari Kepala BPS Muh. Naing, SE yang mengatakan bahwa :

pengolahan yang dilakukan adalah murni dan nama-nama penerima BLT yang dihasilkan adalah dari hasil data yang dikelola yang didapat dari masyarakat yang disesuaikan dengan syarat-syarat penerima BLT tanpa mengurangi atau menambahkan data tersebut.

Memperhatikan data dari hasil penelitian kuisisioner dan hasil wawancara, pengolahan data yang dilakukan oleh BPS membantu implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo.

C.1.3 Pembagian Dana BLT Oleh Kantor Pos

Dalam pembagian dana BLT, kinerja Kantor Pos yang dimaksud adalah :

1. Kemudahan memperoleh dana BLT
2. Pelayanan pada saat pembagian
3. Kecepatan pada saat pembagian
4. Ketepatan waktu pembagian

Dari beberapa hasil penelitian tabel pembahasan sebelumnya di atas tentang kinerja Kantor Pos dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo masyarakat yang menerima BLT hampir semuanya setuju dengan kinerja Kantor Pos dalam

pembagian dana BLT artinya kinerja Kantor Pos dalam pembagian sudah maksimal dan ini membuktikan Pembagian dana BLT yang dilakukan oleh kantor Pos sangat membantu implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo.

C.2. Partisipasi Masyarakat

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) (lihat Abdul Wahab, 1997) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian".

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (target group), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari

semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended/negative effects*). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan itu, faktor-faktor itu dalam hal ini adalah masyarakat yang akan merasakan kebijakan itu.

Dalam implementasi kebijakan BLT, partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari aspek disposisi (sikap) maksudnya sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Peran partisipasi masyarakat akan membantu aparatur pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan BLT di Kota Palopo.

Adapun partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah :

1. Informasi Yang Diberikan Pada Saat Pendataan
2. Tindakan Pada Saat Pembagian

C.2.1 Informasi Yang Diberikan Pada Saat Pendataan

Informasi yang dimaksud disini adalah jawaban masyarakat ketika pencacah melakukan wawancara pada saat pendataan. Dalam

pendataan pencacah memberikan 20 pertanyaan kepada masyarakat. Informasi yang diberikan masyarakat pada saat pendataan akan membantu dalam implementasi kebijakan BLT karena data-data yang akan dihasilkan nantinya yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan BLT itu.

Tabel 4.12 Pendapat Masyarakat Terhadap Kesesuaian Informasi Dalam Pendataan

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Tidak Sesuai	1	1,1	1,1	1,1
Kurang Sesuai	1	1,1	1,1	2,2
Sesuai	87	97,8	97,8	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Dari hasil penelitian tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kesesuaian memberikan informasi sesuai dengan apa yang ditanyakan hampir semuanya sesuai, ini dibuktikan karena 97,8 % masyarakat penerima BLT mengatakan sesuai, 1,1 % mengatakan tridak sesuai dan 1,1 % juga mengatakan kurang sesuai, itu juga dibuktikan dari pegawai BPS yang melakukan pendataan langsung ke masyarakat bahwa :

Dalam pendataan, masyarakat menjawab pertanyaan dengan jujur walaupun ada masyarakat yang tidak jujur dalam menjawab namun bisa diketahui dan langsung diantisipasi dengan melihat keadaan sebenarnya dan mencocokkannya.

Dari persentase masyarakat yang mengatakan sesuai yaitu 97,8 % maka informasi yang diberikan masyarakat pada saat pendataan mendukung implementasi kebijakan BLT

C.2.2 Tindakan Pada Saat Pembagian

Tindakan masyarakat disini yang dimaksud adalah bagaimana keteraturan masyarakat pada saat pembagian dana BLT di kantor Pos. Dalam pembagian dana BLT masyarakat hanya menyodorkan KKB dengan dilengkapi KTP atau SIM. Dan dalam pembagian itu diawasi langsung oleh Polisi dan TNI selaku Babinsa di daerah itu. Sebagaimana pembagian yang dilakukan pada umumnya yang biasa menjadi masalah adalah keteraturan.

Tabel 4.13 Pendapat Masyarakat Terhadap Keteraturan Pada Saat Pembagian Dana BLT

Pendapat masyarakat	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulativ Persen
Tidak Teratur	-	-	-	-
Kurang Teratur	2	2,2	2,2	2,2
Teratur	88	97,8	97,8	
Total	90	100	100	100

Sumber : Data primer 2009

Dari hasil penelitian tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa hampir semuanya masyarakat teratur pada saat pembagian karena 97,8 % mengatakan teratur dan 2,2 % mengatakan kurang teratur, ini pun

sama yang disampaikan oleh salah seorang pegawai kantor POS yang menangani langsung pada saat pembagian dana BLT bahwa :

Masyarakat penerima BLT dalam pembagian pada umumnya memiliki sikap teratur dan tidak ada yang yang membuat kekacauan, dibuktikan dengan antusias mereka dalam antrian.

Melihat persentase yang mengatakan teratur pada saat pembagian yaitu 97,8 % juga dipastikan tindakan masyarakat dalam pembagian dana BLT membantu implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang telah dikemukakan dipembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerima bantuan langsung tunai di Kota Palopo adalah masyarakat miskin Kota Palopo, namun masih banyak juga masyarakat miskin Kota Palopo tidak menerima BLT ini disebabkan karena tidak memenuhi minimal setengah dari empat belas kriteria penduduk miskin penerima BLT
2. Pendataan keluarga/rumah tangga untuk kepentingan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai dikenal dengan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05). Dan dalam pendataan itu pencacah memiliki 20 pertanyaan, pertanyaan itu memuat 14 pertanyaan tentang kriteria penduduk miskin dan 4 penunjang.
3. Proses pengolahan data yang dilakukan oleh BPS adalah indikator pelaksanaan yang mendapat tanggapan negatif dari masyarakat penerima BLT atau masyarakat kurang setuju dengan kinerja BPS dalam pengolahan data.
4. Proses pencairan dana bantuan langsung tunai di kota Palopo berjalan lancar dan menggunakan waktu relatif cepat yaitu

hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit dalam pencairan dana bantuan langsung tunai.

B. Saran

Untuk lebih efektifnya implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo, sebagai bahan masukan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pengimplementasian kebijakan Bantuan Langsung Tunai di kota Palopo hendaknya pemerintah dalam hal ini aparaturnya memaksimalkan kinerjanya agar masyarakat puas dengan pelaksanaan kebijakan itu.
2. Program kebijakan ini mestinya jangan menjadi program tahunan yang berkelanjutan karena kebijakan ini akan membuat masyarakat lebih malas bekerja karena mengandalkan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ala dkk. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Agustina, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ancok, Jamaluddin. 2005. *Pemamfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*. Yogyakarta, Ditya Media
- Bungin, Burhan. M, 2004, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. eet2. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Islamiy, Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara (Cetakan Ketiga Belas, November)*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kencana, Syafii Inu. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Labolo, M., 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Moekijat, Drs. 1995. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Moleong, L.J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mustofa, Kurdi & A. Budoyono, Zainal, 2008, *Visi, Aksi & Solusi Tiga Tahun Pemerintahan SBY*, Jakarta : Yayasan Nida Utama
- Nogi Hessel, S. Tangkilisan. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Naget*. eet2. Yogyakarta : Balairung & CO
- Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kebijakan Dalam Kemiskinan dan Kesenjangan Di Inndonesia*. Yogyakarta : Aditya Mulia
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi)*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- _____. 2003. *Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Riduwan, 2002, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta

Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Suharto, E., 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta

Tanjung, B.N., 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta : Prenada Media Group

B. Dokumen-Dokumen

Inpres no. 12 Tahun 2005

"*Pengertian Bantuan Langsung Tunai*" Artikel diakses dari internet dengan alamat website : [http://www.pengertian Bantuan Langsung Tunai.com](http://www.pengertianBantuanLangsungTunai.com) di telusuri dengan google pada hari jumat 12 desember 2008 Pkl. 11.30 WITA

"*Pengertian Implementasi Kebijakan*" Artikel diakses dari internet dengan alamat website : [http://www.pengertian implementasi kebijakan.com](http://www.pengertianimplementasikebijakan.com) ditelusuri dengan google pada hari jumat 12 desember 2008 Pkl. 11.00 WITA

"*Info Palopo*" Artikel diakses dari internet dengan alamat website : [http://www.pengertian implementasi kebijakan.com](http://www.pengertianimplementasikebijakan.com) ditelusuri dengan google pada hari senin 16 februari 2009 Pkl. 11.00 WITA

LAPORAN POSISI TANGGAL 31-12-2008
 PEMBAYARAN DANA BLT TAHUN 2008

PROVENS	SULAWASI SELATAN
KABUPATEN	PALOPO 91900
KANTOR POS PEMERIKSA	PALOPO 91900

NO	URAIAN	TAHAP - I		TAHAP - II		JUMLAH	
		RTS	BSU	RTS	BSU	RTS	BSU
1	2	3	4	5	6	5	6
1	AOKASI	9,421	2,826,300,000	9,421	3,768,400,000	9,421	6,594,700,000
2	KARTU BATAL	554	166,200,000	582	232,800,000	586	410,200,000
3	JUMLAH A (1-2)	8,867	3,535,100,000	8,839	3,535,600,000	8,835	6,184,500,000
4	KARTU PENGGANTI	554	166,200,000	554	221,600,000	554	387,800,000
5	JUMLAH B (3 + 4)	9,421	2,826,300,000	9,393	3,757,200,000	9,389	6,572,300,000
6	SISA (1 - 5)	-	-	28	11,200,000	32	11,200,000

TABEL JUMLAH RMTG & KKB BERDASARKAN TAHAP I & TAHAP II

PROPINSI : 73 SULAWESI SELATAN

KABUPATEN/KOTA : 73 PALOPO

Kode	Kecamatan	Jumlah RMTG Seluruhnya									
		Tahap I					Tahap II				
		KKB Awal	KKB Batal	KKB Bersih	KKB	KKB	KKB Awal	KKB Batal	KKB Bersih	KKB	Jumlah RTM Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10	WaraSelatan	2,396	1005	55	950	275	43	232	1182		
20	Wara	11954	3120	221	2899	589	74	515	3414		
30	Wara Utara	9794	2524	83	2441	612	37	575	3016		
40	Telluwanua	2398	1577	84	1493	355	39	316	1809		
	Jumlah	27082	8226	443	7783	1831	193	1638	9421		

Ket. : Kol 6 = Kol 4 - Kol 5

Kol 9 = Kol 7 - Kol 8

Kol 10 = Kol 6 + Kol 9

Sumber : Data BPS Palopo

ABEL 09-3. JUMLAH RMTG & KKB BERDASARKAN TAHAP I & TAHAP II

KOPINSI : 73 SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN / KOTA : 73 PALOPO
 CAMATAN : 010 WARA SELATAN

Kode	Kelurahan/Desa	Jumlah RMTG			Tahap I			Tahap II			Jumlah RTM Akhir
		Seluruhnya (3)	KKB Awal (4)	KKB Batal (5)	KKB Bersih (6)	KKB Awal (7)	KKB Batal (8)	KKB Bersih (9)	KKB Bersih (10)		
101	PURANGI	318	164	10	154	62	13	49	203		
102	SAMPODDO	244	156	29	127	34	7	27	154		
103	SONGKA	401	133	6	127	23	5	18	145		
104	TAKKALA	542	165	4	161	25	11	14	175		
105	MAWA	534	177	-	177	79	6	73	250		
106	PETA	357	210	6	204	52	1	51	255		
Jumlah		2,396	1,005	55	950	275	43	232	1,182		

Cat: Kol 6 = Kol 4 - Kol 5
 Kol 10 = Kol 6 + Kol 9
 Kol 9 = Kol 7 - Kol 8

ABEL 09-3. JUMLAH RMTG & KKB BERDASARKAN TAHAP I & TAHAP II

PROPINSI : 73 SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN / KOTA : 73 PALOPO
 KECAMATAN : 020 WARA

(1)	(2)	Jumlah RMTG			Tahap I			Tahap II			Jumlah RTM Akhir (10)
		(3) Seluruhnya	(4) KKB Awal	(5) KKB Batal	(6) KKB Bersih	(7) KKB Awal	(8) KKB Batal	(9) KKB Bersih			
101	BENTENG	1,260	219	52	167	42	8	34	201		
102	SARUTANGA	2,184	461	40	421	98	13	85	506		
103	AMASSANGAN	987	227	15	212	16	4	12	224		
104	TOMPO TIKKA	1,098	237	15	222	34	6	28	250		
105	LAGALIGO	2,256	737	46	691	149	8	141	832		
106	BOTING	1,461	283	12	271	52	11	41	312		
107	TOMARUNDUNG	1,267	449	29	420	66	9	57	477		
108	MUNGKAJANG	427	139	4	135	18	5	13	148		
109	MURANTE	470	157	4	153	52	5	47	200		
110	LATUPPA	544	211	4	207	62	5	57	264		
Jumlah		11,954	3,120	221	2,899	589	74	515	3,414		

df : Kol 6 = Kol 4 - Kol 5 Kol 10 = Kol 6 + Kol 9
 Kol 9 = Kol 7 - Kol 8

TABEL 09-3. JUMLAH RMTG & KKB BERDASARKAN TAHAP I & TAHAP II

PROVINSI : 73 SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN / KOTA : 73 PALOPO
 ECAMATAN : 040 TELLUWANUA

Code	Kelurahan/Desa	Jumlah RMTG			Tahap I			Tahap II			Jumlah RTM Akhir
		Seluruhnya (3)	KKB Awal (4)	KKB Batal (5)	KKB Bersih (6)	KKB Awal (7)	KKB Batal (8)	KKB Bersih (9)	KKB Bersih (10)		
001	BATTANG	695	401	21	380	30	-	30	30	410	
002	MACCANI	505	299	16	283	81	7	74	74	357	
003	SALUBATTANG	166	84	1	83	15	-	15	15	98	
004	MAROANGIN	624	313	2	311	88	12	76	76	387	
005	JAYA	546	269	12	257	118	15	103	103	360	
006	SUMARAMBU	302	211	32	179	23	5	18	18	197	
Jumlah		2,838	1,577	84	1,493	355	39	316	316	1,801	

et: Kol 6 = Kol 4 - Kol 5

Kol 9 = Kol 7 - Kol 8

Kol 10 = Kol 6 + Kol 9

ABEL 09-3. JUMLAH RMTG & KKB BERDASARKAN TAHAP I & TAHAP II

ROPINSI : 73 SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN / KOTA : 73 PALOPO
 KECAMATAN : 030 WARU UTARA

(1)	(2)	Jumlah RMTG			Tahap I			Tahap II			Jumlah RTM Akhir (10)
		(3) Seluruhnya	(4) KKB Awal	(5) KKB Batal	(6) KKB Bersih	(7) KKB Awal	(8) KKB Batal	(9) KKB Bersih			
001	SABBANPARU	1,005	243	12	231	69	6	63	294		
002	BATUPASI	691	254	4	250	27	1	26	276		
003	PONTAP	1,823	410	26	384	195	4	191	575		
004	SALOBULO	1,801	504	23	481	102	8	94	575		
005	BARA	1,550	446	4	442	150	13	137	579		
006	RAMPOANG	2,914	667	14	653	69	5	64	717		
Jumlah		9,794	2,524	83	2,441	612	37	575	3,016		

cat: Kol 6 = Kol 4 - Kol 5 Kol 10 = Kol 6 + Kol 9

Kol 9 = Kol 7 - Kol 8



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA
RUMAH TANGGA MISKIN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Menteri Sosial;
 7. Menteri Dalam Negeri;
 8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 9. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
 10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 12. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 14. Para Gubernur;

15. Para Bupati/Walikota;
16. Kepala Badan Pusat Statistik;
17. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Untuk :

- PERTAMA : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
4. Menteri Keuangan segera melakukan penyediaan pendanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:

- a. koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - b. penyusunan organisasi pelaksana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
6. Menteri Sosial:
- a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
 - b. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM bersama-sama pemerintah daerah.
8. Menteri Komunikasi dan Informatika segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
9. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal segera melaksanakan pemantauan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di daerah tertinggal.
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

11. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penuntutan terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
12. Panglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
14. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
15. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
16. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
 - b. memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
17. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional membantu penyiapan data rumah tangga miskin untuk program pemberian

bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETIGA : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.
- KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan.

Lambock V. Nahattands